

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada tahun 2007, dapat disimpulkan bahwa :

- 1.a Total PAD mencapai Rp. 2.321.285.549.735,79 dengan rata-rata seluruh PAD adalah sebesar Rp. 92.851.421.989,43. Daerah yang memiliki PAD tertinggi adalah Kota Bandung yaitu sebesar Rp. 287.249.534.045,00. Hal ini dikarenakan melihat kondisi Kota Bandung sebagai pusat berkumpulnya aktivitas perdagangan, industri, dan jasa bagi daerah-daerah di sekitarnya sebab peran Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk daerah yang memiliki PAD terendah adalah Kota Banjar yaitu Rp. 23.615.908.225,45. Hal ini dapat terjadi karena belum optimalnya Kota Banjar dalam menggali PAD, apalagi mengingat usianya yang baru berdiri sejak 2003 lalu.
- b. Total DAU mencapai Rp. 14.819.448.223.000,00 dengan rata-rata Rp. 592.777.928.920,00. DAU tertinggi diterima Kab Bandung dengan jumlah DAU Rp. 1.351.912.000.000,00. Tingginya DAU ini disebabkan oleh celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan fiskal daerah melebihi kemampuan fiskal sehingga Pemda membutuhkan bantuan lain berupa DAU. Daerah dengan DAU terendah adalah Kota Cimahi dengan jumlah DAU yaitu Rp. 270,848,000,000.00. Kota Cimahi memiliki peran dan posisi yang cukup

strategis, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan daerahnya tidak terlalu bergantung kepada DAU.

- c. Total belanja modal seluruh daerah populasi sebesar Rp. 4.869.983.599.214,55 dengan rata-rata Rp. 194.799.343.968,58. Kab Bekasi adalah Pemda dengan total belanja modal tertinggi sebesar Rp. 416.359.175.178,00 Tingginya belanja modal ini terutama disebabkan Kab Bekasi sebagai penyangga Ibukota Negara yang mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga memerlukan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan yang terendah adalah Kota Sukabumi dengan jumlah Rp. 68.837.294.096,00 Rendahnya belanja modal ini dapat terjadi dengan kemungkinan memang kebutuhan sarana dan prasarana Kota Sukabumi yang tidak terlalu besar sebab melihat luas dan jumlah penduduknya pun yang juga tidak terlalu besar, maupun karena adanya kekhawatiran bahwa dengan tingginya belanja modal dapat memicu pula biaya rutin lainnya seperti biaya pemeliharaan.
2. Hasil penelitian mengenai hubungan PAD dengan belanja modal menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.612. Hal ini berarti hipotesis diterima yaitu terdapat hubungan positif yang kuat antara PAD dengan belanja modal.
3. Hasil penelitian mengenai hubungan DAU dengan belanja modal menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.630. Hal ini juga berarti hipotesis penelitian diterima yaitu terdapat hubungan positif yang kuat antara DAU dengan belanja modal.

4. Berdasarkan penelitian mengenai hubungan PAD dan DAU dengan belanja modal dapat diketahui bahwa koefisien korelasi berganda adalah 0.734. Hal ini berarti hipotesis penelitian diterima yaitu bahwa PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penyusun menyarankan agar :

1. Sebaiknya Pemda memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik dengan cara meningkatkan alokasi belanja modal untuk kepentingan publik. Sebab dengan meningkatnya alokasi belanja modal akan semakin meningkatkan investasi yang nantinya akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga akan kembali pada meningkatnya pendapatan daerah. Akan tetapi Pemda juga harus efektif dan efisien dalam menentukan alokasi belanja modal, sebab bisa saja dengan tingginya belanja modal tersebut akan mengakibatkan biaya rutin lainnya –biaya pemeliharaan- menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, sebaiknya Pemda berusaha mencari titik temu yang tepat dalam mengalokasikan belanja modal dengan pendapatan yang dimiliki daerah baik dari PAD maupun DAU sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dan pelayanan publik pun dapat tercapai, seperti melalui riset daerah, penyurveian, dan sebagainya.
2. Sebaiknya Pemda terus meningkatkan PAD dibandingkan dengan DAU, sebab PAD merupakan tolak ukur kemandirian daerah. Salah satu cara

meningkatkan PAD dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Dengan tingginya PAD tersebut maka akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pusat.

3. Untuk kedepannya, diharapkan akan ada penelitian lanjutan terutama untuk meneliti mengenai bagaimana hubungan ataupun pengaruh dari tingginya belanja modal terhadap aspek lainnya (bisa terhadap pendapatan daerah maupun belanja lainnya), dengan menggunakan rentang data yang lebih lama sehingga dapat diketahui peningkatan maupun penurunannya. Selain itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan pula dapat meneliti mengenai kontribusi PAD, DAU maupun pendapatan lainnya terhadap belanja modal, sehingga dapat diketahui unsur mana dan seberapa besar yang menjadi kontributor terbesar bagi belanja modal.